

ANALISIS VIDEO

Berjudul : Supremasi Hukum bagian 2

oleh Dr. Didin Widyamtono, M.Pd.

Mata Kuliah : MKU Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.
2. Drs. Rapani, M.Pd.



Nama : Nadia Mela Wulandari

NPM : 2413053183

Kelas : 2F

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, hukum alam yang sederhana tidak lagi cukup untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan struktur hukum yang lebih sistematis dan terorganisir, yang dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua warga negara.

Di Indonesia, prinsip negara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara ini berlandaskan pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem hukum yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah praktik hukum yang sering kali disalahgunakan oleh beberapa oknum. Contohnya seperti korupsi yang menjadi salah satu masalah utama dalam sistem hukum di Indonesia. Banyak pelaku korupsi yang memanfaatkan celah hukum dan jasa pengacara untuk menghindari sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki cara ber hukum dan penegakan hukum agar lebih adil dan transparan.

Era Reformasi 1998 menjadi titik balik dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Reformasi ini membuka peluang untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam sistem hukum, termasuk dalam hal penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran. Namun, perubahan ini harus diiringi dengan komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif, yang mampu melindungi hak-hak masyarakat dan mendorong keadilan sosial.

Dengan demikian, untuk menciptakan negara hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendidikan hukum yang baik, kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara hukum yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyatnya.